

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Postur Total Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021.....	5
1.2	Postur Belanja pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021.....	6
2.1	Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	22
2.2	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	24
2.3	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	25
2.4	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	27
2.5	Rincian Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021 pada Pemerintah Daerah.....	35
2.6	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis	45
3.1	Operasionalisasi Variabel	68
3.2	Populasi Penelitian.....	71
4.1	Anggaran <i>Refocusing</i> Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.....	79
4.2	Anggaran Setelah Adanya Realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	80
4.3	Analisis Deskriptif Rasio Keuangan.....	81
4.4	Hasil Tes Uji Normalitas Rasio Kemandirian Keuangan	82
4.5	Hasil Uji <i>Wicoxon Signed Rank Test</i> pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	83
4.6	Hasil Tes Uji Normalitas Rasio Efektivitas PAD	84
4.7	Hasil Uji <i>Paired Sample T- Test</i> pada Rasio Efektivitas PAD di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	84
4.8	Hasil Tes Uji Normalitas Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	85

4.9	Hasil Uji <i>Paired Sample T- Test</i> pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.....	86
4.10	Hasil Uji <i>Wicoxon Signed Rank Test</i> pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	87
4.11	Hasil Tes Uji Normalitas Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	88
4.12	Hasil Tes Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i> pada Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	89
4.13	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2018)..	90
4.14	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2019)	92
4.15	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2020)	95
4.16	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2021)	97
4.17	Rasio Efektivitas PAD Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2018)	105
4.18	Rasio Efektivitas PAD Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2019)	107
4.19	Rasio Efektivitas PAD Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2020)	110
4.20	Rasio Efektivitas PAD Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2021)	112
4.21	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2018)	119
4.22	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2019)	121
4.23	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2020)	124

4.24	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2021)	126
4.25	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2018)	133
4.26	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2019)	135
4.27	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2020)	137
4.28	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran (Tahun 2021)	139
4.29	Rata-Rata Rasio Keuangan Sebelum dan Setelah Adanya Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran	145